

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

BAB I

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu daerah. Pengendalian inflasi menjadi prioritas bagi pemerintah daerah guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Majene sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami dinamika inflasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pasokan pangan, distribusi barang, dan fluktuasi harga energi.

Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, pemerintah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Majene. TPID bertugas untuk mengoordinasikan berbagai kebijakan dan program pengendalian inflasi melalui pendekatan strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Pada Triwulan II Tahun 2024, TPID Kabupaten Majene melaksanakan berbagai program guna menjaga kestabilan harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia di masyarakat. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas TPID Kabupaten Majene selama periode tersebut, serta sebagai acuan untuk perbaikan strategi ke depan guna mencapai target inflasi yang lebih terkendali.

Landasan Hukum

1. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022-2024.
3. Keputusan Bupati Majene tentang Pembentukan TPID Kabupaten Majene Tahun 2024.

BAB II

PERKEMBANGAN INFLASI DI KABUPATEN MAJENE

Pada Triwulan II Tahun 2024, inflasi di Kabupaten Majene mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan inflasi bulanan adalah sebagai berikut:

- **April 2024:** Inflasi Year on Year (yoy) sebesar **3,25%**, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar **107,10**. Komoditas penyumbang utama inflasi: beras (1,15%), ikan segar (0,85%), dan minyak goreng (0,55%).
- **Mei 2024:** Inflasi Year on Year (yoy) sebesar **3,42%**, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar **107,50**. Komoditas penyumbang utama inflasi: daging ayam ras (1,30%), sayur-sayuran (0,95%), dan bahan bakar rumah tangga (0,60%).
- **Juni 2024:** Inflasi Year on Year (yoy) sebesar **3,50%**, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar **107,80**. Komoditas penyumbang utama inflasi: telur ayam ras (1,20%), gula pasir (0,90%), dan cabai rawit (0,70%).

Faktor Utama Penyebab Inflasi:

1. **Gangguan Pasokan Pangan:** Perubahan musim panen menyebabkan keterlambatan distribusi bahan pangan utama seperti beras dan sayuran.
2. **Kenaikan Harga Energi dan Transportasi:** Harga bahan bakar rumah tangga dan tarif angkutan darat meningkat, berdampak pada harga barang kebutuhan pokok.
3. **Permintaan Musiman:** Peningkatan konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri mendorong kenaikan harga komoditas tertentu.
4. **Fluktuasi Harga Ikan Segar:** Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan nelayan berkurang, mempengaruhi pasokan ikan segar di pasar.

Secara keseluruhan, inflasi di Kabupaten Majene pada Triwulan II 2024 tetap dalam rentang yang terkendali meskipun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. TPID terus melakukan pemantauan harga dan pasokan untuk memastikan inflasi tetap stabil.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

BAB III

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI

Berdasarkan analisis TPID Kabupaten Majene, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengendalian inflasi selama Triwulan II 2024, yaitu:

1. Ketidakstabilan Pasokan Pangan Lokal

- Keterlambatan musim panen akibat cuaca yang tidak menentu menyebabkan pasokan pangan utama seperti beras dan sayuran mengalami gangguan.
- Ketergantungan Kabupaten Majene terhadap pasokan dari daerah lain, terutama untuk komoditas seperti bawang merah dan daging ayam, meningkatkan risiko kenaikan harga ketika distribusi terganggu.

2. Biaya Transportasi dan Distribusi yang Tinggi

- Infrastruktur jalan di beberapa daerah pedalaman masih dalam kondisi kurang baik, menyebabkan biaya distribusi barang meningkat.
- Kenaikan harga bahan bakar berimbas pada biaya logistik, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga bahan pokok.

3. Permintaan Musiman yang Tidak Seimbang

- Lonjakan konsumsi menjelang Idul Fitri dan libur sekolah menyebabkan kenaikan harga beberapa bahan pokok, terutama daging ayam, telur, dan minyak goreng.
- Masyarakat cenderung melakukan pembelian dalam jumlah besar pada periode tertentu, yang mengakibatkan tekanan pada stok barang di pasar.

4. Fluktuasi Harga Ikan Segar

- Sebagai daerah pesisir, ikan segar merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat Majene. Namun, pasokan ikan sering kali berkurang akibat cuaca buruk yang menghambat aktivitas nelayan.

Ketidakpastian jumlah hasil tangkapan menyebabkan harga ikan segar berfluktuasi tajam, mempengaruhi daya beli masyarakat.

5. Kurangnya Diversifikasi Pangan Lokal

- Konsumsi masyarakat masih sangat bergantung pada beberapa komoditas tertentu, seperti beras dan terigu, sehingga ketika harga komoditas ini naik, inflasi menjadi sulit dikendalikan.
- Alternatif pangan lokal seperti umbi-umbian dan jagung belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber karbohidrat alternatif.

6. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Pola Konsumsi yang Bijak

- Edukasi tentang pola konsumsi yang lebih seimbang dan efisien masih kurang efektif, menyebabkan masyarakat tidak memiliki strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok.
- Kesadaran akan pentingnya membeli produk lokal juga masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor atau dari luar daerah.

Permasalahan-permasalahan ini menjadi fokus utama bagi TPID Kabupaten Majene dalam menyusun strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif pada triwulan berikutnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

1. Keterjangkauan Harga

- Melaksanakan operasi pasar murah di berbagai kecamatan, khususnya di wilayah dengan tingkat inflasi tinggi.
- Pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkala melalui kerja sama dengan pedagang pasar dan distributor.
- Subsidi harga untuk beberapa komoditas pangan strategis guna menjaga daya beli masyarakat.

2. Ketersediaan Pasokan

- Meningkatkan produksi pangan lokal melalui pemberian bantuan pupuk dan bibit kepada petani.
- Kerja sama dengan daerah penghasil pangan guna memastikan pasokan tetap stabil.
- Pemberdayaan kelompok nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan segar di pasar.

3. Kelancaran Distribusi

- Memperbaiki infrastruktur jalan menuju pasar dan pusat distribusi bahan pangan.
- Menjalinkan kerja sama dengan perusahaan logistik untuk menekan biaya distribusi.
- Meningkatkan efisiensi sistem rantai pasok guna mengurangi keterlambatan distribusi barang.
-

4. Komunikasi Efektif

- Menyebarluaskan informasi harga pangan secara real-time kepada masyarakat.
- Edukasi pola konsumsi alternatif guna mengurangi tekanan terhadap komoditas yang harganya meningkat.
- Rapat koordinasi rutin TPID untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah dilaksanakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

BAB V

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

1. Keberhasilan Operasi Pasar

- Operasi pasar murah terbukti mampu menekan harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah.
- Namun, cakupan operasi pasar masih perlu diperluas agar lebih merata di seluruh kecamatan.

2. Produksi Pangan Lokal

- Program bantuan pupuk dan bibit meningkatkan produksi, tetapi masih terkendala cuaca ekstrem yang mempengaruhi hasil panen.
- Perlu peningkatan teknologi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Majene.

3. Distribusi dan Logistik

- Perbaikan infrastruktur mulai memberikan dampak positif dalam mempercepat distribusi barang.
- Namun, biaya transportasi masih relatif tinggi sehingga harga barang tetap terdampak.

4. Edukasi dan Perubahan Pola Konsumsi

- Kampanye pola konsumsi alternatif mulai diterima oleh masyarakat, tetapi butuh peningkatan efektivitas penyampaian informasi.
- Masih diperlukan edukasi lebih lanjut tentang diversifikasi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras dan terigu.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

BAB VI

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

1. Optimalisasi Operasi Pasar

- Memperluas cakupan operasi pasar murah, terutama di daerah dengan lonjakan harga tertinggi.
- Menambah pasokan komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga.

2. Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Lokal

- Meningkatkan bantuan teknologi pertanian kepada petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.

Diversifikasi pangan dengan mengembangkan produk alternatif seperti umbi-umbian dan jagung.

3. Peningkatan Efisiensi Distribusi

- Perbaiki infrastruktur secara berkelanjutan guna memperlancar arus distribusi.
- Kerja sama dengan penyedia jasa transportasi untuk menekan ongkos distribusi barang.

4. Edukasi dan Perubahan Pola Konsumsi

- Intensifikasi kampanye konsumsi pangan lokal agar masyarakat lebih terbiasa dengan alternatif pangan.
- Peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat untuk mendorong pengelolaan belanja yang lebih efisien.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

- Peningkatan sistem pemantauan harga dan pasokan barang secara lebih akurat.
- Evaluasi kebijakan setiap bulan guna memastikan efektivitas program pengendalian inflasi.